



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2017

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BALAI ARKEOLOGI JAWA BARAT
2017**

KATA PENGANTAR

i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Arkeologi Jawa Barat Tahun 2017 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*performing goverment*) sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun ketiga dalam periode tahun 2015 – 2019. Hal tersebut seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Balai Arkeologi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviuw Laporan Kinerja.



LAKIP Balai Arkeologi Jawa Barat Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja baik secara fisik maupun anggaran yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2017. Capaian kinerja yang disampaikan merupakan capaian dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2017. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Balai Arkeologi Jawa Barat.

Balai Arkeologi Jawa Barat menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan laporan ini, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Arkeologi Jawa Barat ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Bandung, 8 Januari 2018

Kepala

BALAI ARKEOLOGI
JAWA BARAT
Dra. Desril Riva Shanti
NIP. 196012231989032001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	3
D. PERMASALAHAN UTAMA	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	14
B. REALISASI ANGGARAN	27
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN.....	31

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Arkeologi Jawa Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan Penelitian Arkeologi serta memasyarakatkan hasil-hasil penelitiannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian target kinerja Balai Arkeologi Jawa Barat disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Balai Arkeologi Jawa Barat 2017.

LAKIP ini disusun untuk menggambarkan capaian sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan tidak terlepas dari Rencana Strategis Balai Arkeologi Jawa Barat. Rencana strategis Balai Arkeologi Jawa Barat di implementasikan ke dalam sasaran strategis yaitu tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi.

Analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran merupakan inti dari LAKIP Balai Arkeologi Jawa Barat. Selain itu, LAKIP ini juga menyajikan gambaran umum, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja tahunan Balai Arkeologi Jawa Barat. Pencapaian sasaran strategis diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hasil analisis kinerja, capaian empat indikator kinerja utama yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Indikator kinerja jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis sebesar 100%;
2. Indikator kinerja jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi, terealisasi sesuai target sebesar 100%;
3. Indikator kinerja jumlah informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeologi telah mencapai target sebesar 100%;
4. Indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sesuai target sebesar 100%.

Secara umum, keseluruhan indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu, masih diperlukan upaya dan kerja keras dengan mengoptimalkan sumber daya sehingga pada akhir tahun 2017 semua sasaran strategis dan indikator kinerja dapat tercapai.

Nilai prosentase pencapaian akuntabilitas kinerja Balai Arkeologi Jawa Barat pada Tahun 2017, secara umum telah tercapai 100 % sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi penyerapan keuangan Balai Arkeologi Jawa Barat tercapai 92,69 %.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Peran strategis pembangunan kebudayaan melalui penelitian, pengkajian, pemanfaatan data, dan informasi arkeologi merupakan salah satu wujud dari upaya arkeologi dalam memberi sumbangan kepada pembangunan bidang kebudayaan. Hasil penelitian arkeologi dapat memberikan sumbangan berupa data tentang kesatuan sosial budaya Indonesia dengan upaya untuk mengenal jatidiri bangsa, menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan keberadaan lembaga balai arkeologi selaku lembaga penelitian dan pengembangan arkeologi.

Balai Arkeologi Jawa Barat merupakan salah satu dari sepuluh balai arkeologi di Indonesia. Balai Arkeologi Jawa Barat adalah unit eselon III yang merupakan instansi vertikal di bawah Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sebagai unit eselon II, dengan unit eselon I adalah Badan Penelitian dan Pengembangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat ini memiliki wilayah kerja meliputi 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Lampung.

Balai Arkeologi Jawa Barat memiliki sejarah pendirian yang panjang. Awalnya pada tahun 1981 merupakan Laboratorium Paleoekologi dan Radiometri yang merupakan instalasi Bidang Arkeometri Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Sejak tahun 1992 laboratorium berubah menjadi balai arkeologi dengan nama Balai Arkeologi Bandung. Perubahan tersebut berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0290/O/1992 Tanggal 1 Juli 1992, dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Kalimantan Barat.

Balai Arkeologi Bandung berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 tahun 2001 tanggal 13 September 2001 terintegrasi dalam Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata setelah sebelumnya berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 2003 berdasarkan Keputusan Presiden No. 29, 30, 31, dan 32 tentang Penggabungan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata ke dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Arkeologi Bandung berada langsung di

bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.53/OT.001/MKP/2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang ORTALA Balai Arkeologi. Balai Arkeologi Bandung memiliki wilayah kerja meliputi Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung.

Tahun 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56. Tahun 2012. Tanggal 20 Juli 2012 Balai Arkeologi Bandung dikembalikan lagi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya pada tahun 2015 Balai Arkeologi Bandung berubah nama menjadi Balai Arkeologi Jawa Barat.

Balai Arkeologi Jawa Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat yang berada di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor : 27 Tahun 2015, tanggal 9 Oktober 2015, tentang Organisasi Tata Kerja Balai Arkeologi, Balai Arkeologi Jawa Barat merupakan Satker dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai Tugas dan Fungsi melakukan Penelitian Arkeologi serta memasyarakatkan hasil-hasil penelitiannya.

Hasil kegiatan penelitian arkeologi yang telah dilaksanakan oleh Balai Arkeologi Jawa Barat telah banyak dijadikan sebagai bahan dan acuan penentuan kebijakan pembangunan. Informasi arkeologi yang diperoleh khususnya mengenai sejarah kebudayaan dapat dijadikan sebagai bahan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebangsaan. Bahkan beberapa sumber daya arkeologi di daerah mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk kebutuhan ekonomi.

B. Dasar Hukum

Balai Arkeologi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional merupakan perpanjangan tangan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di daerah. Keberadaan Balai Arkeologi memiliki landasan yang sangat kuat untuk pengembangan arkeologi kedaerahan yang merupakan dasar untuk perkembangan arkeologi Indonesia. Pendirian Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama Balai Arkeologi sebagai UPT memiliki landasan hukum, seperti diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 32, yaitu pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah-daerah seluruh Indonesia. Hal tersebut selaras dengan UU No.22 Tahun 1999 yang memberikan

kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan pengelolaan kebudayaan di wilayahnya sendiri.

Dasar hukum yang memperkuat keberadaan Balai Arkeologi adalah UU No. 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, yang merupakan revisi dari UU no. 5 Tahun 1992 yang pada intinya mengamanatkan keharusan bagi pemerintah untuk melakukan penelitian dan melestarikan benda budaya. Keberadaan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan UPT-nya merupakan bagian yang sangat penting untuk mengembangkan amanat-amanat tugas tersebut.

Balai Arkeologi Jawa Barat sebagai salah satu instansi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Lakip Balai Arkeologi Jawa Barat 2017 disusun berlandaskan tiga dasar hukum yaitu: 1) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 2). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah; 3). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang sistem akuntabilitas kinerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyusunan Lakip Balai Arkeologi Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dari laporan yang disajikan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

I. Tugas dan Fungsi

Balai Arkeologi Jawa Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat yang berada di daerah, mempunyai tugas *“Melakukan Penelitian dan Pengembangan Arkeologi di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”*. Dalam melaksanakan tugas, Balai Arkeologi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Penelitian arkeologi;
- b. Pelaksanaan analisis dan interpretasi benda-benda arkeologi;
- c. Pendayagunaan hasil penelitian arkeologi;

- d. Publikasi hasil penelitian arkeologi; dan
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai.

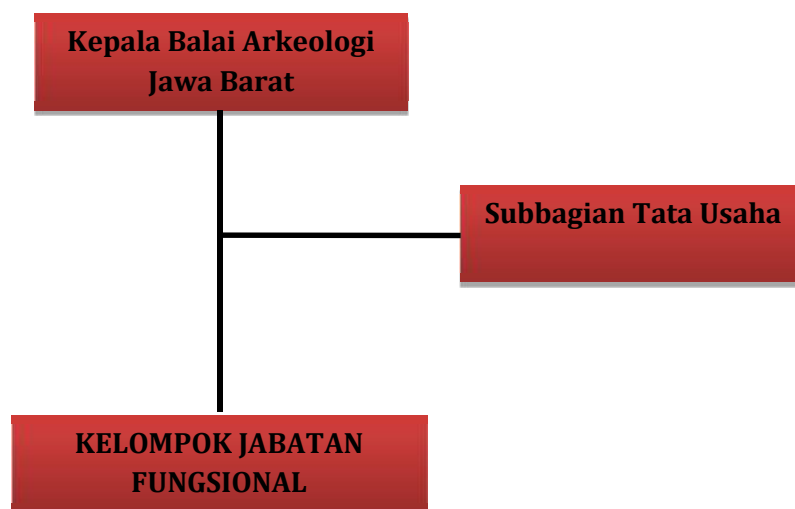
II. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 April 2015, Balai Arkeologi Jawa Barat merupakan satuan kerja eselon III, yang berada di bawah eselon II Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan eselon I Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Balai Arkeologi merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang penelitian dan pengembangan arkeologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan dan secara teknis bertanggung jawab kepada Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015. Selain hal tersebut, di dalam permen tersebut dijelaskan bahwa Balai Arkeologi dipimpin oleh seorang Kepala. Susunan Balai Arkeologi terdiri dari Kepala, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, hubungan masyarakat, Barang Milik Negara, kerumahtanggaan dan perpustakaan Balai Arkeologi.

Balai Arkeologi Jawa Barat merupakan satuan kerja eselon III, yang terdiri dari 1 Kepala Balai, 1 Kepala Subbagian Tata Usaha, 12 Fungsional Tertentu yang didukung dengan tenaga fungsional umum sebanyak 10 serta tenaga kontrak sebanyak 13 orang pegawai.

Struktur Organisasi Balai Arkeologi Jawa Barat digambarkan sebagai berikut.



D. Permasalahan Utama

Permasalahan utama yang dihadapi Balai Arkeologi Jawa Barat dengan wilayah kerja yang meliputi empat provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Provinsi Lampung adalah ratusan situs arkeologi belum ditangani disamping situs-situs yang sudah ditangani tetapi belum optimal. Dengan kata lain masih terdapat situs-situs yang informasi sejarah budaya, serta masyarakatnya belum digali secara maksimal. Untuk menggali dan mengungkap sejarah budaya dan masyarakat masa lalu diperlukan sumberdaya manusia dan dana yang memadai. Sampai saat ini kebutuhan sumberdaya tersebut belum tercukupi. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Balai Arkeologi Jawa Barat dalam memenuhi tugas dan fungsinya, serta pencapaian sarannya. Persoalan lain adalah banyaknya situs arkeologi yang belum terkaji secara mendalam. Hal ini berpengaruh pada pemasyarakatan hasil penelitian yang diharapkan.

Tersebarunya situs-situs arkeologi di empat provinsi yang meliputi hampir 50 Kabupaten/kota, hingga saat ini baru sebagian kecil yang diimbangi dengan komunikasi yang lancar dan berkesinambungan antara Balai Arkeologi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten/Kota yang menguasai aset sumberdaya

arkeologi. Hal ini mengakibatkan kurangnya sinergitas terhadap pengelolaan sumberdaya arkeologi.

Dewasa ini, arkeologi belum dikelola potensinya secara maksimal dan profesional. Hal tersebut disebabkan perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah kebudayaan masih belum maksimal. Permasalahan klasik yang selalu muncul dalam lembaga-lembaga di daerah adalah masalah koordinasi lembaga terkait. Salah satu faktornya adalah belum saling tahu atau mengenal lembaga-lembaga budaya seperti Balai Arkeologi, dan sering terjadinya penggantian/rotasi pejabat terkait di daerah. Masih kurangnya sosialisasi diperkirakan juga sebagai salah satu penyebabnya. Seperti diketahui bahwa Balai Arkeologi Jawa Barat, yang mempunyai wilayah kerja 4 yaitu Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Lampung kegiatan sosialisasi belum dapat menjangkau secara merata. Berkaitan dengan hal ini, kedepan Balai Arkeologi Jawa Barat dalam merancang program kerja khususnya penelitian yang akan dilakukan lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

Kendala utama dalam mengatasi permasalahan penelitian arkeologi di daerah, adalah masalah sumberdaya manusia (SDM) peneliti. Secara kuantitas dan kualitas masih kurang dari harapan ideal sebuah lembaga penelitian.

Sebagai upaya untuk mengurai dan memecahkan permasalahan, Balai Arkeologi Jawa Barat membuat berbagai perencanaan dan program yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Tujuan Strategis yang akan dicapai selama lima tahun (2015 - 2019), yaitu

a. Rencana Strategis

1. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengkajian arkeologi;
2. Memasyarakatkan hasil-hasil penelitian arkeologi;
3. Meningkatkan jaringan kerja dengan lembaga terkait;
4. Merekomendasikan Hasil Penelitian untuk penanganan dan pemanfaatan sumber daya arkeologi;
5. Memajukan kebudayaan daerah.

b. Tujuan Strategis

1. Penelitian arkeologi secara tematis dan eksploratif di wilayah kerja Balai Arkeologi Jawa Barat;
2. Pengkajian nilai-nilai budaya masa lalu sebagai landasan pembangunan;
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional di Balai Arkeologi Jawa Barat;
4. Terjalannya kemitraan yang sinergis di wilayah kerja;
5. Melakukan pemasyarakatan hasil-hasil penelitian melalui penyebarluasan informasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BALAI ARKEOLOGI JAWA BARAT

Mengacu pada rencana strategis tahun 2015-2019, Balai Arkeologi Jawa Barat telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2017. Perjanjian Kinerja memberikan informasi target-target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2017. Target kinerja tersebut merupakan tahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama lima tahun ke depan. Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

Balai Arkeologi Jawa Barat memiliki perjanjian kinerja antara Kepala Balai Arkeologi Jawa Barat (unit eselon III) dengan Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) selaku eselon II. Program utama Balai Arkeologi Jawa Barat adalah program untuk mendukung kinerja Pusat Penelitian Arkeologi Nasional selaku eselon II dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku eselon I. Selain itu, sebagai bagian dari Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Arkeologi Jawa Barat berupaya memberikan dukungan program dan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian target indikator kinerja utama, sehingga bisa mendukung *outcome* utama yang ditetapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Program yang telah ditetapkan oleh Balai Arkeologi Jawa Barat adalah

1. Penelitian arkeologi secara tematik, holistik, dan terpadu antar disiplin arkeologi dan ilmu bantu lainnya;
2. Pendokumentasian hasil-hasil penelitian arkeologi untuk dapat diakses masyarakat berbagai kalangan;
3. Peningkatan kapasitas publikasi atau pemasyarakatan hasil-hasil penelitian arkeologi melalui berbagai media;
4. Peningkatan kemitraan atau kerjasama dengan para pemangku kepentingan (*stake holders*) dan pelayanan kepada masyarakat tentang penelitian di

wilayah kerja Balai Arkeologi Jawa Barat;

5. Pengembangan dan peningkatan secara kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya serta peningkatan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan skala prioritas.

Program yang telah ditetapkan oleh Balai Arkeologi Jawa Barat direalisasikan ke dalam kegiatan-kegiatan Balai, yaitu sebagai berikut.

1. Merencanakan dan melaksanakan penelitian arkeologi;
2. Mengadakan pameran hasil-hasil penelitian arkeologi;
3. Penyuluhan dan seminar arkeologi;
4. Menerbitkan/mempublikasikan hasil-hasil penelitian arkeologi;
5. Pengembangan "Rumah Peradaban".

Pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur pencapaian suatu kinerja. Indikator Kinerja Utama ditetapkan guna mendukung pencapaian sasaran strategis Balai Arkeologi Jawa Barat. Sasaran strategis tersebut adalah tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi.

Indikator Kinerja Utama Balai Arkeologi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

1. Jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis;
2. Jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi;
3. Jumlah informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeologi.

Perjanjian Kinerja Balai Arkeologi Jawa Barat, pedoman pelaksanaannya secara rinci tertuang dalam Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Perjanjian Kinerja Balai Arkeologi Jawa Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Anggaran (dalam ribuan)</i>
(1)	(2)	(3)	
Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Arkeologi Lintas Disiplin dan Tematis <ul style="list-style-type: none"> • Hasil Penelitian Arkeologi Komponen: <ul style="list-style-type: none"> -Desain dan Instrumen -Pelaksanaan Penelitian -Pengolahan dan Analisis Data -Konservasi dan Duplikasi -Evaluasi dan Publikasi 	13 Dokumen/Opsi Kebijakan	1.077.401
	Jumlah Rumah Rumah Peradaban Sebagai Media Pemanfaatan Hasil Penelitian Arkeologi <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rumah Peradaban Yang Dikembangkan Komponen: <ul style="list-style-type: none"> -Identifikasi Situs dan Design Perencanaan -Pengembangan Rumah Peradaban -Dokumentasi/Laporn 	4 Lokasi	521.730
	Jumlah Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi <ul style="list-style-type: none"> • Rumah Peradaban Yang Dikembangkan Komponen: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Rumah Peradaban (Penerbitan Buku Ilmiah/Jurnal) 	1600 Orang	174.360
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Keuangan, Kepegawaian, dan Evaluasi Kinerja Sesuai dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 	1 Layanan	154.183

Pencapaian sasaran strategis seperti yang tertuang pada tabel tersebut di atas diukur melalui empat indikator kinerja yaitu: 1) jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis; 2) jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi; 3) jumlah informasi hasil penelitian dan

pengembangan arkeologi; dan 4) jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Indikator kinerja jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis dicapai melalui *output* dokumen/opsi kebijakan hasil penelitian arkeologi dengan volume kegiatan sebanyak 13 meliputi 1 kegiatan bedah proposal, 1 penelitian penanggulangan kasus, 1 kegiatan EHPA (Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi, dan penelitian dengan 3 tema untuk 10 kegiatan. Tema penelitian terdiri dari 3 tema yaitu (1) kajian manusia, budaya, dan lingkungan Prasejarah Indonesia 3 kegiatan; (2) pengaruh peradaban Hindu-Budha di Nusantara 2 kegiatan penelitian, (3) pengaruh Peradaban Islam-Kolonial di Nusantara 5 kegiatan penelitian.

Rincian ketigabelas output adalah sebagai berikut.

- 1) Bedah Proposal di Kantor Balai Arkeologi Jawa Barat
- 2) Penelitian Penelitian Ragam Temuan di Situs Neolitik Leuwisari dan Ciastana II, Tasikmalaya: Penyebaran Penutur Austronesia di Jawa Bagian Barat (Tema 1);
- 3) Penelitian Pendalaman tentang Pemukiman di Situs Gua Pawon, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat (Tema 1);
- 4) Penelitian Paleoekologi Situs Cariang, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Tema 1);
- 5) Penelitian Fungsi Bangunan di Situs Telagajaya IV, Desa Teluk Buyung, Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat (Tema 2);
- (6) Penelitian Arsitektur Bangunan Suci di Situs Indihiang, Tasikmalaya (Tema 2);
- (7) Penelitian Budaya Masa Islam Di Perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat (Tema 3);
- (8) Penelitian Morfologi Kademangan Karangsembung Kadipaten, Majalengka (Tema 3);
- (9) Penelitian Bangunan Kolonial Awal Abad ke-19 M sampai dengan Awal ke-20 M di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat (Tema 3);
- (10) Kampung-kampung Tua Masyarakat Keratuan Darah Putih, di sekitar Gunung Rajabasa, Lampung Selatan (Tema 3);
- (11) Kereta Api Jalur Cirebon-Kadipaten: Aksesibilitas Antar-Wilayah di Cirebon dan sekitarnya Pada Awal Abad XX (Tema 3).

- (12) Penelitian Penanggulangan kasus Bangunan Tinggalan Jepang d Kecamatan Cireunghas Sukabumi; Tinggalan megalitik dan arca di kawasan Cipanas Cianjur; dan Tinggalan batu tapak, pipisan, dan arca di Kecamatan Gunung Kencana, Lebak Banten.
- (13) Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi di Kantor Balai Arkeologi Jawa Barat.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis adalah sebesar Rp.1.077.401.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh empat ratus satu ribu rupiah).

Indikator kinerja jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dicapai melalui dokumen *output* rumah peradaban yang dikembangkan dengan volume kegiatan sebanyak 4 lokasi yaitu:1) Rumah Peradaban kawasan Cirebon berupa seminar arkeologi; 2) Rumah Peradaban Kawasan Pandeglang, Banten berupa sekolah arkeologi; 3) Rumah Peradaban Kuningan berupa kemah arkeologi, (4) Rumah Peradaban Tasikmalaya, berupa pameran partisipasi. Anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja ini sebesar Rp.521.730,000,-(lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Indikator kinerja jumlah informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeologi dicapai melalui *output* Rumah Peradaban yang dikembangkan dengan dengan sasaran volume kegiatan mencapai 1600 orang. *Output* ini dicapai melalui kegiatan penerbitan buku ilmiah/Jurnal meliputi cetak Jurnal Purbawidya volume 6 (1) dan volume 6 (2), cetak Buku Penelitian Arkeologi, dan Buku Pengayaan Arkeologi. Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja ini sebesar Rp. 174.360.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Indikator kinerja yang terakhir yaitu jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku dicapai melalui *output* Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan kegiatan berupa penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, dan pelayanan rumah tangga dengan sasaran volume kegiatan 1 layanan. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja sebesar Rp.154.183.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Secara keseluruhan alokasi pagu Balai Arkeologi Jawa Barat tahun 2017 termasuk *output* Layanan Perkantoran dan Layanan Internal adalah sebesar Rp.6.734.285.000,-(Enam milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BALAI ARKEOLOGI JAWA BARAT

Target kinerja dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017, Balai Arkeologi Jawa Barat berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan/*stakeholders*. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian keberhasilan/kegagalan dari target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipeertanggungjawabkan. Uraian sasaran strategis dan indikator kinerja serta realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian target kinerja dalam sajian berikut.

A. CAPAIAN KINERJA BALAI ARKEOLOGI JAWA BARAT

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2017, Balai Arkeologi Jawa Barat menetapkan satu sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017, Capaian kinerja dan keuangan merupakan cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan berhasilnya capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam target capaian dari sisi akuntabilitas kinerja maupun dari sisi akuntabilitas keuangan yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis "*Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi*" sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja.

Sasaran strategis tersebut capaian realisasinya diukur oleh empat indikator kinerja, yaitu jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis, jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi, jumlah informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeologi, dan jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian dan evaluasi kinerja sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan data pada capaian kinerja tahun 2017, keempat indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkat ketercapaian antara target dan realisasi adalah sebagai berikut.

Tingkat Ketercapaian Masing-masing Indikator Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017			
		Target	%	Realisasi	%
Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi	1. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Arkeologi Lintas Disiplin dan Tematis	13 Dok/Opsi kebijakan	100	13 Dok/opsi kebijakan	100
	2. Jumlah Rumah Peradaban Sebagai Media Pemanfaatan Hasil Penelitian Arkeologi	4 lokasi	100	4 lokasi	100
	3. Jumlah Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi	1600 orang	100	1600 orang	100
	4. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Keuangan, Kepegawaian, dan Evaluasi Kinerja Yang Sesuai Dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	1 layanan	100	1 layanan	100

Indikator Kinerja 1, “jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis” telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian target sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu 13 dokumen, yaitu 1 kegiatan bedah proposal , 1 kegiatan EHPA, 1 penelitian penanggulangan kasus, dan penelitian dengan 3 tema untuk 10 kegiatan, yaitu tema kajian manusia, budaya, dan lingkungan Prasejarah Indonesia 3 kegiatan; tema pengaruh peradaban Hindu-Budha di Nusantara 2 kegiatan penelitian, tema pengaruh Peradaban islam-Kolonial di Nusantara 5 kegiatan penelitian. Kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana untuk capaian indikator tersebut adalah: (1) 1 (satu) dokumen/opsi kebijakan kegiatan bedah proposal di kantor Balai Arkeologi Jawa Barat; (2) 1 dokumen/opsi kebijakan kegiatan EHPA (Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi di kantor Balai Arkeologi Jawa Barat; (3) 1 (satu) dokumen/opsi kebijakan penelitian penanggulangan kasus untuk 3 kegiatan penelitian di situs baru, yaitu Bangunan Tinggalan Jepang di Kecamatan Cireunghas Sukabumi; Tinggalan megalitik dan arca di kawasan Cipanas Cianjur; dan Tinggalan batu tapak, pipisan, dan arca di Kecamatan

Gunung Kencana, Lebak Banten; Penelitian dengan tema Kajian manusia, budaya, dan lingkungan Prasejarah di Indonesia berupa (4) Penelitian Ragam Temuan di Situs Neolitik Leuwisari dan Ciastana II, Tasikmalaya: Penyebaran Penutur Austronesia di Jawa Bagian Barat; (5) Penelitian Pendalaman tentang Pemukiman di Situs Gua Pawon, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat; (6) Penelitian Paleoeкологи Situs Cariang, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat; Penelitian dengan tema Pengaruh Peradaban Hindu-Budha di Nusantara berupa (7) Fungsi Bangunan di Situs Telagajaya IV, Desa TelukBuyung, Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat; (8) Penelitian Arsitektur Bangunan Suci di Situs Indihiang, Tasikmalaya; Penelitian dengan tema Pengaruh Peradaban Islam – Kolonial di Nusantara (9). Budaya Masa Islam Di Perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat; (10). Morfologi Kademangan Karangsembung Kadipaten, Majalengka; (11). Bangunan Kolonial Awal Abad ke-19 M sampai dengan Awal ke-20M di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat; (12) Kampung-kampung Tua Masyarakat Keratuan Darah Putih, di sekitar Gunung Rajabasa, Lampung Selatan; (13) Kereta api Jalur Cirebon-Kadipaten: Aksesibilitas Antar-Wilayah di Cirebon dan sekitarnya Pada Awal Abad XX.



*Temuan Rangka VI Temuan kotak T4S3
Situs Gua Pawon, Bandung Barat*



*Singkapan struktur batu pada kotak
T2S2, T3S2, T4S2 Situs Indihiang,
Tasikmalaya*

Keberhasilan *Indikator Kinerja 1* “Jumlah dokumen/opsi kebijakan hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis” disebabkan oleh beberapa hal, (a) perencanaan matang melalui pembuatan RD (Riset Design), pemilihan permasalahan, kesesuaian metode, waktu pelaksanaan, dan sumber daya peneliti serta alat penelitian; (b) terjalinnya hubungan yang baik antara aparat, masyarakat, dan peneliti di lokasi penelitian; dan (3) evaluasi melalui kegiatan EHPA (Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi) Balai Arkeologi Jawa Barat.



Kegiatan Ekskavasi di Situs Telagajaya IV Karawang

Meskipun demikian, **Indikator Kinerja 1**, jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis telah mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi di dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa hambatan dan proses dalam pencapaian target. Hambatan tersebut diantaranya sumber daya peralatan yang kurang memadai, kondisi alam ataupun cuaca, dan ketertutupan masyarakat di lokasi terhadap informasi tinggalan arkeologi.

Pelaksanaan kegiatan penelitian bidang arkeologi yang memiliki hambatan, di antaranya adalah

- Penelitian Pendalaman tentang Pemukiman di Situs Gua Pawon, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yaitu kurangnya alat untuk keamanan tim peneliti dan tenaga lokal karena ekskavasi dilakukan di dalam gua dengan kondisi tanah yang labil dan penggalian sudah mencapai kedalaman lebih dari 2 meter;

- Penelitian Fungsi Bangunan di Situs Telagajaya IV, Desa Teluk Buyung, Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yaitu pelaksanaan ekskavasi tidak bisa dilakukan sesuai rencana karena masih dalam musim tanam padi;
- Penelitian Kereta api Jalur Cirebon-Kadipaten: Aksesibilitas Antar-Wilayah di Cirebon dan sekitarnya Pada Awal Abad XX, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yaitu pelaksanaan survei yang bersamaan dengan tingginya curah hujan dan sulitnya beberapa masyarakat untuk memberikan informasi tinggalan arkeologi.

Beberapa hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penelitian di atas, telah dilakukan langkah antisipasi, yaitu

- Penelitian Pendalaman tentang Pemukiman di Situs Gua Pawon, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, langkah antisipasi yang dilakukan adalah melakukan penggalan dengan hati hati dan memperhitungkan kelabilan tanah.
- Penelitian Fungsi Bangunan di Situs Telagajaya IV, Desa Teluk Buyung, Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, langkah antisipasi yang dilakukan adalah melakukan memindahkan rencana kotak ekskavasi yang tidak terdapat tanaman padi tetapi masih sesuai dengan tujuan penelitian.
- Penelitian Kereta api Jalur Cirebon-Kadipaten: Aksesibilitas Antar-Wilayah di Cirebon dan sekitarnya Pada Awal Abad XX, langkah antisipasi yang dilakukan adalah menggunakan strategi menyesuaikan prediksi jam-jam turunnya hujan dengan pelaksanaan di lapangan serta menyiapkan jas hujan/*raincoat*. Adapun untuk antisipasi masyarakat yang sulit untuk memberi informasi tinggalan arkeologi adalah melakukan pendekatan kekeluargaan dengan tokoh masyarakat untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan penelitian.

Keberhasilan capaian indikator kinerja Balai Arkeologi Jawa Barat di tahun 2017 dapat diamati dari capaian indikator kinerja tahun sebelumnya. Perbandingan tingkat ketercapaian indikator kinerja di tahun 2016 dan tahun 2017.

Perbandingan Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Tahun 2016</i>			<i>Tahun 2017</i>		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<i>Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi</i>	1. Jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis	14 dokumen	18 dokumen	128	13 dokumen/ opsi kebijakan	13 dokumen/ opsi kebijakan	100

Capaian indikator kinerja jumlah hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis di tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun 2016. Capaian indikator kinerja tahun 2016 melampaui target dengan persentase capaian 128 %. Tingginya realisasi jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis disebabkan tingginya penelitian penanggulangan kasus. Penelitian penanggulangan kasus adalah penelitian yang bersifat insidental dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Alokasi anggaran yang cukup besar di tahun 2016 untuk penelitian penyelesaian kasus, juga turut mendukung tercapainya realisasi yang tinggi indikator kinerja ini. Alokasi anggaran yang cukup tinggi menyebabkan tingginya permintaan masyarakat untuk penelitian penyelesaian kasus di beberapa lokasi dapat dipenuhi.

Tahun 2017 melalui perencanaan matang dan penentuan skala prioritas dalam penelitian penanggulangan kasus capaian indikator kinerja jumlah hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis sesuai target yang telah ditentukan, yaitu 13 dokumen/opsi kebijakan.

Indikator kinerja 2 “ Jumlah Rumah Peradaban Sebagai Media Pemanfaatan Hasil Penelitian Arkeologi” telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian target sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu 4 lokasi dengan persentase capaian sebesar 100 %.

Pada tahun 2017 Balai Arkeologi Jawa Barat kegiatan Rumah Peradaban dilaksanakan di 4 (empat) kota/kabupaten yaitu di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten; Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Tasikmalaya, dan Cirebon. Kegiatan Rumah peradaban merupakan penyebarluasan hasil penelitian arkeologi, dan sosialisasi terhadap arti penting tinggalan budaya masa lalu kepada

masyarakat yang kegiatannya dikemas melalui, kemah arkeologi, sekolah arkeologi, seminar nasional, dan pameran arkeologi.

Kegiatan-kegiatan yang terlaksana untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain: (1) Kegiatan kemah arkeologi di Kabupaten Kuningan; (2) Pelaksanaan kegiatan sekolah arkeologi di Kabupaten Pandeglang; (3) Pelaksanaan pameran kerjasama di Kabupaten Tasikmalaya; dan (4) Seminar Nasional Rumah Peradaban di Cirebon.



Kegiatan Seminar Nasional Rumah Peradaban di Cirebon

Penyebab keberhasilan *Indikator Kinerja 2* “jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi”, karena adanya perencanaan dan komunikasi yang baik antar panitia kegiatan, instansi terkait, dan peserta sehingga kendala dilapangan dapat diatasi. Selain itu, antusiasme masyarakat yang tinggi sangat mendukung suksesnya kegiatan rumah peradaban.

Indikator kinerja 2 meskipun capaian indikator sesuai target yang ditetapkan, sebanyak 4 lokasi namun dalam pelaksanaan masih terdapat sedikit hambatan dan permasalahan. Adapun hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan masih ditemukan pada kegiatan sebagai berikut

- Kegiatan Rumah Peradaban Pameran Kerjasama di Kabupaten Tasikmalaya, hambatan dalam pelaksanaan ini adalah kurang memadai ruang dan lokasi kegiatan pameran. Hal tersebut disebabkan kecilnya ruang yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Pameran ini merupakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut.

- Kegiatan Rumah Peradaban Pameran Kerjasama di Kabupaten Tasikmalaya, langkah antisipasi yang diambil adalah pembuatan objek pameran yang singkat dan padat, alat peraga pameran yang tidak memakan ruang tetapi konunikatif.



Kegiatan Rumah Peradaban Sekolah Arkeologi di Kabupaten Pandeglang yang diikuti oleh siswa-siswa SMA se Pandeglang, Banten



Antusiasme Pengunjung Anak-anak Sekolah dan Masyarakat Umum di Kegiatan Pameran Rumah Peradaban Kabupaten Tasikmalaya

Keberhasilan capaian indikator kinerja Balai Arkeologi Jawa Barat di tahun 2017 dapat diamati dari capaian indikator kinerja tahun sebelumnya. Perbandingan tingkat ketercapaian indikator kinerja di tahun 2016 dan tahun 2017, adalah sebagai berikut.

Perbandingan Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Tahun 2016</i>			<i>Tahun 2017</i>		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<i>Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi</i>	2. Jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi	3 dokumen	3 dokumen	100	4 lokasi	4 lokasi	100

Capaian indikator kinerja 2 “jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi” tahun 2016 dan tahun 2017 sesuai target yang

direncanakan yaitu dengan persentase 100 %. Meskipun terdapat perbedaan target antara tahun 2016 yaitu dokumen dan 2017 berupa lokasi capaian antara 2016 dan 2017 tetap dapat diperbandingkan. Hal tersebut disebabkan karena dokumen di tahun 2016 juga dimaksudkan sebagai lokasi rumah peradaban. Dengan demikian jumlah target pada tahun 2017 lebih meningkat, yaitu dari 3 lokasi di tahun 2016 menjadi 4 lokasi pada tahun 2017. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat akan informasi hasil penelitian arkeologi.

Indikator kinerja 3 “Jumlah Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi”

Indikator kinerja “jumlah informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeologi” telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100 %, sejumlah 1600 orang. Indikator ini tercapai melalui Publikasi Hasil Penelitian Arkeologi melalui media cetak yaitu kegiatan menyebarluaskan informasi arkeologi dan hasil penelitian arkeologi melalui penerbitan buku ilmiah. Pada tahun 2017 Balai Arkeologi Jawa Barat, hasil yang dicapai telah menerbitkan 2 (dua) nomor jurnal arkeologi sejumlah 400 eksemplar, 2 (dua) Buku Berita Penelitian Arkeologi sejumlah 600 eksemplar, dan 2 (dua) buku pengayaan sejumlah 600 eksemplar.

Perbandingan Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi	3. Jumlah Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi	700 orang	1211 Orang	173	1600 Orang	1600 Orang	100

Capaian indikator kinerja 3 “jumlah informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeologi” di tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun 2016. Capaian indikator kinerja tahun 2016 melampaui target dengan persentase capaian 173 %. Tingginya realisasi jumlah informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeologi tahun 2016 disebabkan pada indikator ini termasuk kegiatan pameran dan penerbitan buku ilmiah. Kegiatan pameran tahun 2016 sangat banyak

pengunjung. Hal tersebut tidak terlepas dari antusiasme masyarakat yang tinggi mengunjungi stand pameran Balai Arkeologi Jawa Barat. Adapun tahun 2017 capaian indikator pada **indikator kinerja 3** “jumlah informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeologi” berupa kegiatan penerbitan buku ilmiah, sedangkan kegiatan pameran masuk dalam indikator kinerja 2 “ Jumlah Rumah Peradaban Sebagai Media Pemanfaatan Hasil Penelitian Arkeologi”.

Penyebab keberhasilan Indikator Kinerja 3 “jumlah informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeologi” tidak terlepas dari antusias masyarakat yang tinggi meminta terbitan informasi arkeologi dan hasil penelitian pada Balai Arkeologi Jawa Barat. Terdistribusinya terbitan buku baik informasi maupun hasil penelitian arkeologi seperti Purbawidya, BPA, dan Buku Pengayaan juga berkontribusi dalam ketercapaian kinerja indikator ini.

Indikator kinerja 4 “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Keuangan, Kepegawaian, dan Evaluasi Kinerja Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku”

Indikator kinerja ini telah berhasil dilaksanakan sesuai target yang ditentukan sejumlah 1 layanan dengan persentase 100 %. Indikator ini tidak terdapat hambatan dan permasalahan.

Kegiatan *indikator kinerja 4* untuk mendukung Tugas dan Fungsi Balai Arkeologi Jawa Barat kegiatan yang dicapai tahun 2017, yaitu (1) Penyusunan Rencana Anggaran, kegiatan perencanaan yang telah dilaksanakan penyusunan program dan anggaran dengan melakukan diskusi dengan para peneliti dan staf Balai Arkeologi Jawa Barat yang hasil dalam bentuk dokumen Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), RKAL dan RAB sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran selama 1 (satu) tahun; (2) Pengelolaan Keuangan, layanan Keuangan yang telah dilaksanakan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Keuangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, KPPN Bandung I, dan Ditjen Perbendaharaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Dalam rangka peningkatan penyusunan laporan keuangan mengikutkan pegawai serta diklat operator Simak BMN dan operator SAIBA. Sebagai ouput layanan keuangan telah menyusun laporan SAI secara berkala setiap bulan, triwulan dan semester 1 dan 2; (3) Pengelolaan Kepegawaian, kegiatan kepegawaian merupakan kegiatan rutin dengan melakukan menyusun data base pegawai Daftar Nominatif Pegawai, Daftar urutan Kepangkatan (DUK), menyusun usulan mutasi pegawai, menyusun usulan tunjangan kinerja pegawai

dan lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian; (4) Pelayanan Rumah Tangga, layanan Rumah Tangga/Umum yang melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Balai Arkeologi Jawa Barat tahun 2017, capaian yang dihasil adalah 1 dokumen sebagai laporan kinerja Balai Arkeologi Jawa Barat sebagai pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2017

Keberhasilan capaian indikator kinerja Balai Arkeologi Jawa Barat di tahun 2017 dapat diamati dari capaian indikator kinerja tahun sebelumnya. Perbandingan tingkat ketercapaian indikator kinerja di tahun 2016 dan tahun 2017.

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator</i>	<i>Tahun 2016</i>			<i>Tahun 2017</i>		
		<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
<i>Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi</i>	4. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian dan evaluasi kinerja sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	4 dokumen	4 dokumen	100	1 Layanan	1 Layanan	100

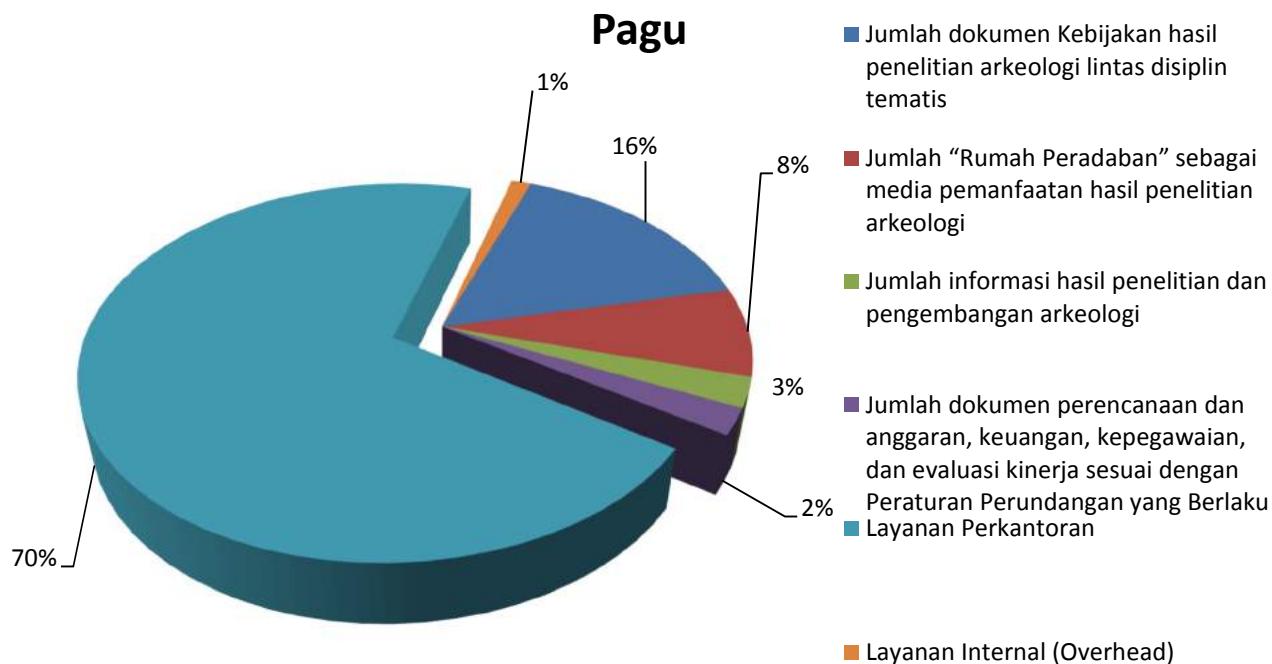
Capaian ***indikator kinerja 4*** “jumlah dokumen perencanaan dan anggaran keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ” tahun 2016 dan tahun 2017 sesuai target yang direncanakan yaitu dengan persentase 100 %. Meskipun terdapat perbedaan target antara tahun 2016 yaitu dokumen dan 2017 berupa layanan capaian antara 2016 dan 2017 tetap dapat diperbandingkan. Hal tersebut disebabkan karena layanan di tahun 2017 didalamnya berupa 4 suboutput seperti 4 suboutput di tahun 2016, yaitu yaitu (1) Penyusunan Rencana Anggaran; (2) Pengelolaan Keuangan; (3) Pengelolaan Kepegawaian; (4) Pelayanan Rumah Tangga.

Secara keseluruhan capaian dari keempat indikator kinerja di tahun 2017 sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan adanya perhitungan yang matang dan cermat dalam perencanaan. Capaian indikator kinerja di tahun 2017 jauh lebih baik dibandingkan tahun 2016, karena pada tahun 2016 terdapat satu indikator dari lima indikator yang ditetapkan tidak mencapai target. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan tingkat ketercapaian kinerja tahun 2016 dan 2017 berikut ini.

<i>Sasaran</i> <i>Strategis</i>	<i>Indikator</i> <i>Kinerja</i>	<i>Tahun 2016</i>			<i>Tahun 2017</i>		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<i>Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi</i>	1. Jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis	14 dokumen	18 dokumen	128	13 dokumen/ opsi kebijakan	13 dokumen/ opsi kebijakan	100
	2. Jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi	3 dokumen	3 dokumen	100	4 lokasi	4 lokasi	100
	3. Jumlah Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi	700 orang	1211 Orang	173	1600 Orang	1600 Orang	100
	4. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian dan evaluasi kinerja sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	4 dokumen	4 dokumen	100	1 Layanan	1 Layanan	100
	5. Jumlah rumusan kebijakan dan rekomendasi penelitian dan pengembangan arkeologi	2 dokumen	1 dokumen	50	-	-	

B. REALISASI ANGGARAN

Persentase Alokasi Anggaran



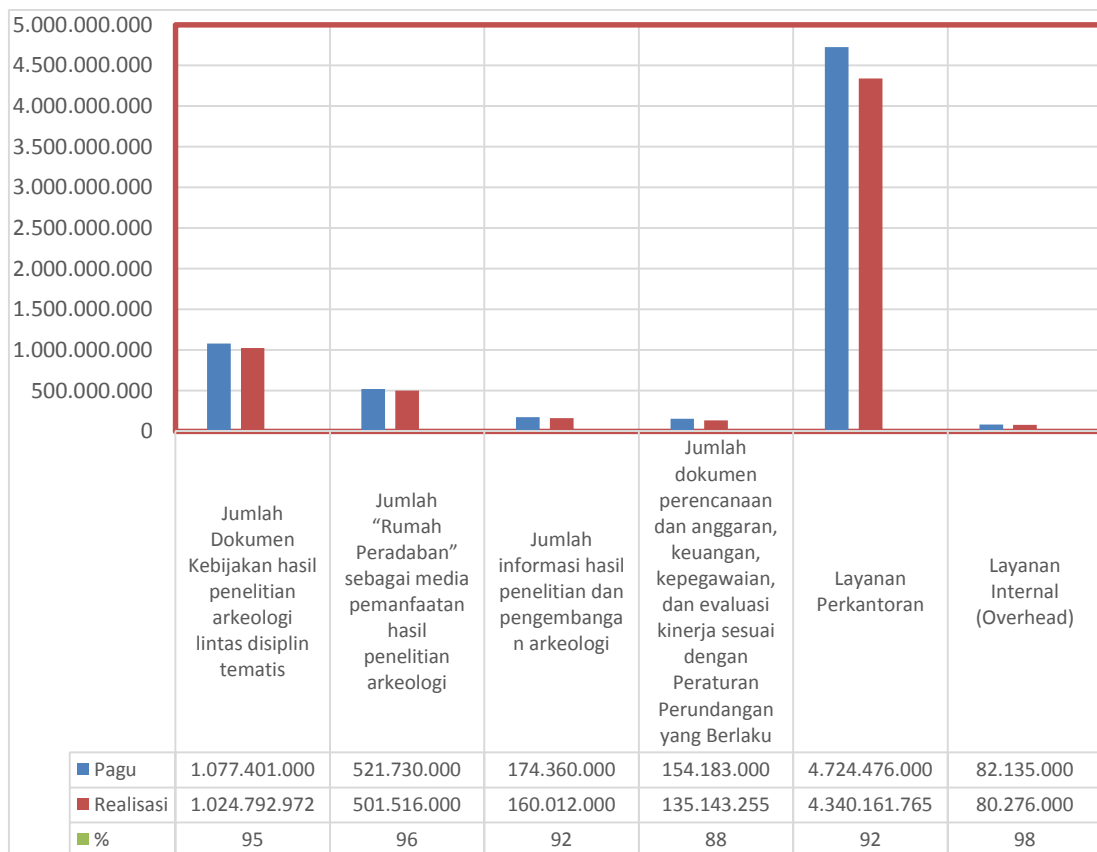
Pagu belanja Balai Arkeologi Jawa Barat pada DIPA Tahun Anggaran 2017 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Balai Arkeologi Jawa Barat sebesar Rp. 6.734.285.000,- (Enam milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang digunakan untuk membiayai satu program 4 (empat) indikator kinerja termasuk layanan perkantoran dan layanan internal (*overhead*).

Berikut tabel alokasi anggaran tahun 2017 pada Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Arkeologi.

<i>Indikator Kinerja</i>		<i>Anggaran</i>
1	Jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin tematis	Rp. 1.077.401.000,-
2	Jumlah “Rumah Peradaban” sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi	Rp. 521.730.000,-
3	Jumlah informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeologi	Rp. 174.360.000,-
5	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan evaluasi kinerja sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	Rp. 154.183.000,-
6	Layanan Perkantoran	Rp. 4.724.476.000,-
7	Layanan Internal (Overhead)	Rp. 82.135.000,-

Dari pagu anggaran Rp. 6.734.285.000,- telah berhasil terserap sebesar Rp. 6.241.901.992,- sehingga persentase daya serap Balai Arkeologi Jawa Barat tahun 2017 adalah sebesar 92.69%.

Berikut grafik daya serap anggaran pada Program Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, dengan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Arkeologi dengan 4 Indikator Kinerja Balai Arkeologi Jawa Barat Tahun 2017.



Keseluruhan indikator kinerja tahun 2017 sesuai dengan target yang ditentukan. Adapun hambatan tidak diperoleh dari indikator kinerja 1 hingga 4.

Dari pagu sebesar Rp. 6.734.285.000,- jika dilihat dari capaian kinerja yang dihasilkan pada tahun anggaran 2017, Balai Arkeologi Jawa Barat dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 492.383.008,-, yang diperoleh dari belanja perjalanan, sisa kontrak, belanja bahan dan belanja pegawai.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Arkeologi Jawa Barat tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Balai Arkeologi Jawa Barat atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK), sebagai pengembalian amanah yang harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap tugas dan fungsi Balai Arkeologi Jawa Barat di Wilayah Kerja. PK yang disusun merupakan bagian dari usaha Balai Arkeologi Jawa Barat dalam pencapaian Renstra tahun 2015—2019.

LAKIP Balai Arkeologi Jawa Barat tahun 2017 melaporkan capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara umum pada tahun 2017 dapat disimpulkan Balai Arkeologi Jawa Barat telah dapat merealisasikan 4 IKK sesuai perencanaan mencapai target sasaran strategis yang ditetapkan, yaitu persentase 100%. Pencapaian sasaran strategis tersebut dapat memberikan kontribusi langsung dalam pencapaian tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2015--2019. Hal ini didukung fakta bahwa kinerja Balai Arkeologi Jawa Barat pada tahun 2017 sudah dapat merealisasikan 100 %, dari sasaran strategis yang merupakan penjabaran misi Balai Arkeologi Jawa Barat, yaitu: 1) Memasyarakatkan hasil-hasil penelitian arkeologi, 2) Meningkatkan jaringan kerja dengan lembaga terkait, 3) Merekomendasikan Hasil Penelitian untuk penanganan dan pemanfaatan Sumberdaya arkeologi, dan 4) Memajukan kebudayaan daerah. Kaitannya dengan ketercapaian 4(empat) misi tersebut, Balai Arkeologi Jawa Barat telah melaksanakan program dan kegiatan yang dititikberatkan pada penelitian dan pengembangan di bidang arkeologi, dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung penelitian dan pengembangan arkeologi, peningkatan pendidikan SDM, dan meningkatkan/koordinasi kerja sama dengan dinas terkait di wilayah kerja Balai Arkeologi Jawa Barat. Secara umum tingkat capaian pada tahun ketiga dari renstra Balai Arkeologi Jawa Barat tahun 2015-2019, kinerja Balai Arkeologi Jawa Barat pada tahun 2017 dapat dinyatakan memuaskan, walaupun masih terdapat permasalahan yang dihadapi.

LAMPIRAN

- 1. Penetapan Kinerja 2017**
- 2. Pengukuran Kinerja 2017**



**Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Kepala Balai Arkeologi Jawa Barat
dengan Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional**

TUGAS

Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang arkeologi di wilayah kerja Balai Arkeologi Jawa Barat berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

TUGAS

Penelitian arkeologi;
Pelaksanaan analisis dan interpretasi benda-benda arkeologi;
Pendayagunaan hasil penelitian arkeologi;
Publikasi hasil penelitian arkeologi; dan
Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balar.

**TARGET KINERJA
BALAI ARKEOLOGI JAWA BARAT
TAHUN 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (dalam ribuan)
(1)	(2)	(3)	
Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Arkeologi Lintas Disiplin dan Tematis Hasil Penelitian Arkeologi Komponen: -Desain dan Instrumen -Pelaksanaan Penelitian -Pengolahan dan Analisis Data -Konservasi dan Duplikasi -Evaluasi dan Publikasi	13 Dokumen/ Ops Kebijakan	1.077.401
	Jumlah Rumah Rumah Peradaban Sebagai Media Pemanfaatan Hasil Penelitian Arkeologi Dokumen Rumah Peradaban Yang Dikembangkan	4 Lokasi	521.730
	Jumlah Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Rumah Peradaban Yang Dikembangkan Komponen: - Pengembangan Rumah Peradaban (Penerbitan Buku Ilmiah/Jurnal)	1600 Orang	174.360
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Keuangan, Kepegawaian, dan	1 Layanan	

	Evaluasi Kinerja Sesuai dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		154.183
--	--	--	---------

Program Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud dengan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi di Balai Arkeologi Jawa Barat Tahun 2017, jumlah anggaran sebesar **Rp.6.734.285.000.**

LAMPIRAN – 2

Pengukuran Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Arkeologi Lintas Disiplin dan Tematis	13 Dokumen/Opsi Kebijakan	13 Dokumen/Opsi Kebijakan	100
		Jumlah Rumah Peradaban Sebagai Media Pemanfaatan Hasil Penelitian Arkeologi	4 Lokasi	4 Lokasi	100
		Jumlah Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi	1600 Orang	1600 Orang	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Keuangan, Kepegawaian, dan Evaluasi Kinerja Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	1 Layanan	1 Layanan	100

Capaian Kinerja yang tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja :

1. Indikator Layanan Perkantoran dengan Target 12 Bulan dengan realisasi 12 bulan (100 %)
2. Indikator Layanan Internal dengan target 1 (satu) Layanan dengan realisasi 1 Layanan(100%)

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja keseluruhan indikator tercapai sesuai target yang ditetapkan, tanpa hambatan yang berarti.

Program Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, dengan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi Daya Serap terhadap Indikator Kinerja sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi	Jumlah Dokumen Kebijakan Hasil Penelitian Arkeologi Lintas Disiplin dan Tematis	Rp.1.077.401.000,-	Rp. 1.024.792.972,-	95.12
2		Jumlah Rumah Peradapan Sebagai Media Pemanfaatan Hasil Penelitian Arkeologi	Rp. 521.730.000,-	Rp. 501.516.000,-	95.17
3		Jumlah informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeologi	Rp.174.360.0000,-	Rp.160.012.000,-	91.77
4		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Keuangan, Kepegawaian, dan Evaluasi Kinerja Sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	Rp. 154.183.000,-	Rp. 135.143.255,-	87.65

Total Daya Serap termasuk Indikator Layanan Perkantoran dan Layanan Internal (Overhead) sebesar Rp. 6.241.901.992,-(92,69 %).